SINERGITAS TIM KEWASPADAAN DINI DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Asri Ainun Asyura
NPP. 33.0826
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong
Email: asriainunasyura@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH.
Email: baiq@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The increasing social dynamics, population mobility, and ethnic diversity in Tarakan City have the potential to trigger social conflicts if not proper;y anticipated. These conditions encourage the strengthening of the early warning system through synergy among government institutions in maintaining social stability and public order. However, there are still obstacles, particularly the absence of regional regulations specifically governing early warning mechanisms and inter-agency coordinantion in the early detection of social conflicts, as well as the lack of early detection programs for potential conflicts.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synergy between the regional Early Warning Team and the Civil Service Police Unit in strengthening the early detection of potential conflicts in Tarakan City.* ***Method:*** *The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical strategy. Data were collected through interviews, observation, and documentation.* ***Result:*** *The results show that inter-agency synergy has been established in the form of hybrid coordination, which is a combination of formal and informal mechanisms based on kinship relationships. The Regional Agency for National Unity and Politics acts as the central information control, while the Civil Service Police Unit serves as the operational executor in the field. The affectiveness of early detection is supported by intensive communication, the use of information technology, and community participation. However, several challenges remain, including limited budgets, suboptimal quality of human resources, and the absence of established regional regulations.*
Conclusion: *Inter-agency synergy between the regional Early Warning Team and the Civil Service Police Unit has been established through hybrid coordination that strengthens the early detection of potential conflicts in Tarakan City. The effectiveness of this synergy is supported by intensive communication, the use of information technology, and community participation, although challenges related to limited budgets, suboptimal human resources, and the absence of regional regulations still persist.*
Keywords: *Civil Service Police Unit; Conflict Early Detection; Early Warning Team; Nation Unity and Politics Agency; Social Conflict; Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Meningkatnya dinamika sosial, perpindahan penduduk, serta keberagaman etnis di Kota Tarakan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak diantisipasi secara tepat. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penguatan sistem kewaspadaan dini melalui sinergitas antar lembaga pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat kendala berupa belum terbentuknya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme kewaspadaan dini dan koordinasi antar lembaga dalam deteksi dini konflik sosial serta kurangnya program deteksi dini potensi konflik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memperkuat deteksi dini potensi konflik di Kota Tarakan. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antar lembaga telah terbangun dalam bentuk koordinasi hibrida, yaitu kombinasi antara mekanisme formal dan informal berbasis hubungan kekeluargaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai pusat kendali informasi, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pelaksana operasional di lapangan. Efektivitas deteksi dini didukung oleh komunikasi yang intensif, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia, serta regulasi daerah masih belum terbentuk. **Kesimpulan:** Sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memperkuat deteksi dini potensi konflik di Kota Tarakan telah terbangun melalui koordinasi hibrida yang didukung komunikasi intensif, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia, serta belum terbentuknya regulasi daerah.

Kata kunci: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Deteksi Dini; Konflik Sosial; Satuan Polisi Pamong Praja; Sinergitas; Tim Kewaspadaan Dini,

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kewaspadaan dini menjadi sorotan global seiring meningkatnya perpindahan penduduk dan aktivitas lintas negara yang memunculkan potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Development Programme* (UNDP) menekankan pentingnya sistem early warning sebagai alat pencegahan konflik, terutama di negara yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama. *Global Status of Multi-Hazard Early Warning System* melaporkan bahwa 108 negara atau 55% negara di dunia telah memiliki sistem peringatan dini (UNDRR, 2025). Sejalan dengan itu, Labolo (2019) menegaskan bahwa pemerintahan modern dituntut mampu mengelola dinamika masyarakat melalui tata kelola yang responsif, adaptif, dan berbasis antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan sosial.

Konflik Ukraina sejak invasi tahun 2022 menunjukkan bahwa sistem peringatan dini di wilayah berkonflik memerlukan strategi yang adaptif dan kolaborasi kuat antar-stakeholder. Serangan siber dan pengalihan sumber daya untuk krisis kemanusiaan menghambat penyampaian informasi penting, sehingga integrasi data dan kerja sama lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan sistem peringatan dini (Climate & Risks, 2024).

Di Indonesia, keberagaman etnis, budaya, agama, dan tingkat kesejahteraan menjadi tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Ketidakseimbangan pembangunan, akses sumber daya, lemahnya mekanisme dialog, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya fungsi pemerintah daerah dalam deteksi dini dapat memicu kerawanan sosial. Menurut Labolo (2017), keberagaman sosial dan politik yang tidak dikelola secara baik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mengganggu stabilitas sosial dan politik. Laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat 110 konflik yang melibatkan masyarakat adat selama Januari–Maret 2025 dengan akar konflik berupa perebutan ruang dan sumber daya (AMAN, 2025).

Kota Tarakan pernah mengalami konflik antaretnis pada tahun 2010. Meskipun konflik telah berakhir, pemisahan sosial masih terlihat melalui pola permukiman berdasarkan kesukuan. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya arus perpindahan penduduk. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Tarakan meningkat dari 248,97 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 255,31 ribu jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sekitar 6,34 ribu jiwa. Fenomena ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila masyarakat lokal merasa terdiskriminasi oleh keberhasilan ekonomi pendatang (BPS, 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Labolo (2016) menjelaskan bahwa pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan fungsi dasar pemerintahan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan. Sementara itu, Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa kewaspadaan dini merupakan langkah sistematis, cepat, dan terkoordinasi untuk mendeteksi serta mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa.

Namun, implementasi kewaspadaan dini di Kota Tarakan belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan perangkat formal di tingkat akar rumput. Banyak kelurahan belum memiliki Satlinmas aktif sehingga informasi potensi konflik sering terlambat sampai kepada Tim Kewaspadaan Dini. Selain itu, forum komunikasi lintas etnis jarang melakukan pertemuan rutin, beberapa wilayah masih menunjukkan segregasi etnis, dan sosialisasi deteksi dini kepada masyarakat masih terbatas. Rozie (2016) menyatakan bahwa keberhasilan penertiban dan pencegahan gangguan ketenteraman sangat bergantung pada deteksi dini, koordinasi lapangan, dan keterlibatan masyarakat sebagai sumber informasi awal.

Pentingnya peran masyarakat juga ditunjukkan oleh laporan bahwa 86% konflik sosial di Indonesia berhasil diselesaikan oleh aktor lokal seperti penghulu, penyuluh, dan pembimas (Arsyad, 2024). Selain itu, efektivitas sistem deteksi dini sangat ditentukan oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, komunikasi intensif, serta forum koordinasi di tingkat lokal (Pham et al., 2024). Dalam perspektif etika pemerintahan, Labolo (2015) menekankan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial melalui pelayanan publik yang adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi karena Tarakan merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Kalimantan Utara dengan pertumbuhan penduduk dan arus migrasi yang terus meningkat. Belum terbentuknya Satlinmas secara optimal, belum adanya regulasi daerah khusus, serta terbatasnya jangkauan pemerintah di tingkat akar rumput menunjukkan perlunya penguatan sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergitas tersebut penting untuk memastikan komunikasi, koordinasi, pertukaran informasi, dan pelaksanaan tindakan preventif berjalan secara terpadu guna memperkuat deteksi dini konflik sosial dan menjaga stabilitas daerah. Hal ini sejalan

dengan pandangan Labolo (2019) bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pemerintah dalam membangun koordinasi, kolaborasi, dan respons cepat terhadap berbagai persoalan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Berdasarkan penelitian "Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara", penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan yang ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, belum terbentuknya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme kewaspadaan dini, belum optimalnya keberadaan Satlinmas di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta masih terbatasnya program deteksi dini konflik sosial. Kondisi tersebut menjadi penting karena Kota Tarakan memiliki tingkat keberagaman etnis yang tinggi, sejarah konflik sosial antar etnis pada tahun 2010, serta peningkatan jumlah penduduk akibat arus migrasi yang berpotensi memunculkan gesekan sosial baru. Meskipun pemerintah daerah telah membentuk Tim Kewaspadaan Dini dan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban masyarakat, implementasi sistem kewaspadaan dini masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas deteksi dini konflik sosial, efektivitas tim penanganan konflik, sistem kewaspadaan dini, serta sinergitas pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan konflik, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas operasional antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini potensi konflik sosial pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran komunitas, forum masyarakat, pemerintah daerah, maupun tim terpadu penanganan konflik secara umum, sementara kajian mengenai pola koordinasi, komunikasi, pembagian peran, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya penguatan deteksi dini antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP di daerah dengan karakteristik multietnis seperti Kota Tarakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bentuk sinergitas kedua lembaga dalam memperkuat deteksi dini konflik sosial serta merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Kota Tarakan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sinergitas Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendeteksi potensi konflik sosial di Kota Tarakan sebagai dasar penguatan sistem kewaspadaan dini daerah. Kondisi Kota Tarakan yang memiliki tingkat keberagaman etnis tinggi, sejarah konflik sosial, peningkatan jumlah penduduk akibat arus migrasi, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan, ketersediaan Satlinmas, dan regulasi daerah terkait kewaspadaan dini menunjukkan perlunya pengkajian yang mendalam terhadap mekanisme deteksi dini yang selama ini berjalan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membangun sistem pencegahan konflik yang lebih efektif dan responsif. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan data dan informasi dalam memahami efektivitas kerja sama antar lembaga yang berperan dalam deteksi dini konflik, sehingga upaya pencegahan berisiko tidak berjalan optimal,

potensi konflik sulit teridentifikasi sejak awal, dan stabilitas sosial masyarakat dapat lebih rentan terganggu.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai deteksi dini konflik sosial, sinergitas antar lembaga, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas deteksi dini dan pencegahan konflik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar aktor, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rochmawati, Imroatul Azizah, dan Amang Fathurrohman mengkaji penguatan Forum Perempuan Lokal di Kecamatan Tosari Pasuruan sebagai deteksi dini konflik sosial pada masyarakat Suku Tengger. Penelitian tersebut menggunakan metode *Community-Based Research* dengan pendekatan teori partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum perempuan berperan penting dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini melalui mekanisme mediasi informal dan pendekatan kultural. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas anggota, kurangnya dukungan pembiayaan, serta belum adanya regulasi yang mengatur peran forum perempuan dalam sistem deteksi dini. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mazerolle dkk. (2013) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan perlakuan yang adil oleh institusi publik dapat meningkatkan legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pencegahan konflik.

Penelitian Lusi Andriyani, Henni Wijayanti, dan Mohamad Nasih membahas sinergitas pemerintah lokal, elit lokal, dan komunitas dalam penyiapan pencegahan konflik horizontal di wilayah rawan konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas mampu mendukung proses identifikasi serta pencegahan konflik. Akan tetapi, efektivitas sinergitas tersebut masih dipengaruhi oleh konflik internal politik, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta pengaruh negatif media dan kelompok kepentingan tertentu. Temuan ini memperkuat pendapat Jackson dkk. (2012) bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan terciptanya stabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh legitimasi institusi pemerintah yang dibangun melalui hubungan yang partisipatif dan berbasis persetujuan masyarakat (*policing by consent*).

Selanjutnya, penelitian Cika Nurunnisa Anadirga, Nurliah Nurdin, dan Marja Sinurat mengkaji efektivitas penanganan konflik sosial oleh Tim Terpadu di Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori efektivitas. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penanganan konflik sosial masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar instansi, ketidakselarasan data dan informasi, serta belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS). Kondisi tersebut menyebabkan proses deteksi dini dan respons konflik belum berjalan secara efektif. Hasil ini relevan dengan penelitian Gau (2012) yang menunjukkan bahwa efektivitas dan legitimasi lembaga publik sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kelembagaan, kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang responsif, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban.

Penelitian Eko G. Samudro, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Adityo Santoso meneliti sistem deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan teori *Conflict Early Warning System* (CEWS) dan *Conflict Early Warning Early Response System* (CEWERS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem deteksi dini dapat berjalan efektif apabila didukung oleh pemetaan potensi konflik, analisis risiko yang baik, serta

koordinasi antar pemangku kepentingan. Implementasi CEWERS terbukti berperan dalam mencegah konflik berbasis agama dan sosial di wilayah penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gau dan Brunson (2011) yang menegaskan bahwa kepercayaan dan legitimasi terhadap institusi penegak ketertiban dibangun melalui prosedur yang transparan, konsisten, dan mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga mendukung efektivitas kebijakan pencegahan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Habib Rahman Nugraha, Halomoan F.S. Alexander, Agus Adriayanto, dan Herlina Juni Risma Saragih yang membahas sinergitas Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik SARA. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori sinergitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antar pemerintah telah berjalan melalui dialog lintas agama, pemetaan kerawanan sosial, dan koordinasi forum kewaspadaan dini. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa tumpang tindih kewenangan, kurang jelasnya pembagian tugas antar instansi, serta belum terstandarisasinya alur komunikasi. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Terpstra (2020) yang menyatakan bahwa reformasi kelembagaan sering menghadapi berbagai dilema organisasi, terutama dalam proses perubahan struktur, pembagian kewenangan, dan penyesuaian mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini (TKD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang belum banyak diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran komunitas dalam deteksi dini konflik, sinergitas pemerintah dengan elit lokal, efektivitas tim terpadu penanganan konflik, maupun sistem peringatan dini secara umum. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada hubungan operasional dan koordinasi kelembagaan antara TKD dan Satpol PP sebagai aktor utama dalam sistem kewaspadaan dini daerah. Selain itu, penelitian ini mengambil konteks yang unik, yaitu Kota Tarakan yang memiliki sejarah konflik etnis, tingkat migrasi penduduk yang tinggi, belum optimalnya pembentukan Satlinmas di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme deteksi dini konflik sosial. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini memiliki karakteristik objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari aspek teori dan analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Teori Sinergitas Michael Doctoroff (1977) dengan empat dimensi utama, yaitu komunikasi efektif, umpan balik (*feedback*), kepercayaan (*trust*), dan kreativitas (*creativity*), untuk menganalisis pola kerja sama antara TKD dan Satpol PP dalam memperkuat deteksi dini konflik sosial. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan teori partisipasi masyarakat, teori konflik, teori efektivitas, maupun *Conflict Early Warning System* (CEWS). Hasil penelitian menemukan bentuk koordinasi hibrida, yaitu kombinasi antara mekanisme formal dan informal berbasis hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan deteksi dini konflik sosial. Temuan mengenai model koordinasi hibrida tersebut menjadi kontribusi konseptual baru dalam kajian sinergitas pemerintahan daerah, khususnya dalam penguatan sistem kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial di daerah yang memiliki tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memperkuat pelaksanaan deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam bentuk sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memperkuat deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan menggali makna, proses, pola koordinasi, serta dinamika hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan kewaspadaan dini konflik sosial. Fokus penelitian didasarkan pada konsep sinergitas Michael Doctoroff (1977) yang mencakup dimensi komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan sistem kewaspadaan dini. Informan kunci adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan karena berperan sebagai koordinator Tim Kewaspadaan Dini serta memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan informasi terkait potensi konflik sosial. Informan lainnya meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial, anggota Tim Kewaspadaan Dini, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di Kota Tarakan. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan kewaspadaan dini.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar temuan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara bertahap berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi dokumen dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Kewaspadaan Dini, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kewaspadaan dini daerah. Kegiatan penelitian berlangsung selama Tahun Akademik 2025/2026 yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang aktual mengenai sinergitas antar lembaga dalam deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan (Miles & Huberman, 1994).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deteksi dini konflik sosial menjadi salah satu fungsi penting pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial masyarakat yang kondusif. Kota Tarakan sebagai daerah yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta keberagaman latar belakang sosial masyarakat memerlukan sistem kewaspadaan yang mampu mendeteksi berbagai potensi gangguan sosial secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi penting karena kedua instansi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi, melakukan pemantauan lapangan, serta menyampaikan rekomendasi penanganan kepada pemerintah daerah.

Tabel 1.
Jenis Potensi Konflik Sosial yang Dipantau oleh Tim Kewaspadaan Dini Kota Tarakan

No	Jenis Potensi Konflik	Bentuk Potensi Konflik
1	Konflik sosial masyarakat	Perselisihan antar kelompok masyarakat
2	Konflik kepentingan sosial	Perbedaan kepentingan antar kelompok
3	Konflik akibat penyebaran informasi	Informasi yang berpotensi memicu keresahan masyarakat
4	Konflik lingkungan sosial	Perselisihan yang berkembang di lingkungan masyarakat
5	Gangguan ketertiban umum	Aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, 2026.

Berdasarkan **Tabel 1**, potensi konflik sosial yang dipantau oleh Tim Kewaspadaan Dini tidak hanya terbatas pada konflik yang telah terjadi, tetapi juga berbagai gejala sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan deteksi dini lebih menekankan pada upaya pencegahan daripada penanganan setelah konflik terjadi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada kemampuan antarinstansi dalam membangun hubungan kerja yang efektif sehingga informasi yang diperoleh dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini di Kota Tarakan dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari pengumpulan informasi lapangan, pemantauan media sosial, laporan masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi. Proses tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara mandiri sehingga diperlukan sinergitas yang kuat antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengetahui bagaimana sinergitas tersebut terbentuk, analisis selanjutnya dilakukan berdasarkan dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas yang dikemukakan oleh Doctoroff.

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun sinergitas antarinstansi. Dalam konteks deteksi dini potensi konflik sosial, komunikasi berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi yang memungkinkan setiap pihak memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan secara cepat dan akurat. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil pemantauan lapangan berpotensi mengalami keterlambatan sehingga mengurangi efektivitas upaya pencegahan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, komunikasi antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, dan pertemuan antarinstansi yang diselenggarakan secara berkala. Sementara itu, komunikasi informal dilakukan melalui hubungan personal antaranggota tim yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat ketika ditemukan indikasi konflik di lapangan.

Selain komunikasi tatap muka, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antarinstansi. Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP memanfaatkan aplikasi pesan instan dan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan situasi keamanan daerah. Pemanfaatan teknologi tersebut mempermudah proses penyebaran informasi sehingga setiap pihak dapat segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2
Temuan Penelitian pada Dimensi Komunikasi

Indikator	Temuan Penelitian
Rapat koordinasi	Dilaksanakan secara berkala antarinstansi
Komunikasi informal	Dilakukan melalui hubungan personal antaranggota
Media komunikasi	WhatsApp, Facebook, dan Instagram
Pertukaran informasi	Berlangsung secara cepat dan berkesinambungan
Kesamaan persepsi	Dibangun melalui forum koordinasi dan diskusi bersama

Sumber: Hasil wawancara dan observasi penelitian, 2026.

Berdasarkan **Tabel 2**, komunikasi yang terjalin antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja telah mendukung proses pertukaran informasi secara efektif. Keberadaan rapat koordinasi membantu membangun kesamaan persepsi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi potensi konflik. Di sisi lain, komunikasi informal yang terjalin antaranggota tim mempercepat penyampaian informasi sehingga respon terhadap potensi konflik dapat dilakukan secara lebih cepat.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Doctoroff yang menempatkan komunikasi sebagai unsur penting dalam membangun sinergitas. Komunikasi yang efektif memungkinkan setiap pihak memahami tujuan bersama, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat hubungan kerja antarinstansi sehingga mendukung pelaksanaan deteksi dini potensi konflik sosial secara lebih optimal.

3.2 Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sinergitas antarinstansi karena menunjukkan bagaimana informasi yang diterima dapat direspons, ditindaklanjuti, dan dievaluasi secara bersama-sama. Dalam konteks deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan, umpan balik tidak hanya dipahami sebagai tanggapan terhadap suatu laporan, tetapi juga mencakup proses verifikasi informasi, koordinasi tindakan lapangan, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, umpan balik menjadi indikator yang menunjukkan apakah komunikasi yang telah dibangun mampu menghasilkan tindakan nyata dalam mencegah terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme umpan balik antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan melalui berbagai saluran informasi. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, hasil pemantauan lapangan, maupun media sosial tidak langsung diterima begitu saja, tetapi terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan tingkat kebenarannya. Setelah informasi dianggap valid, instansi terkait melakukan koordinasi guna menentukan bentuk tindakan yang akan diambil. Proses tersebut menunjukkan bahwa umpan balik yang terjadi tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan interaksi aktif antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan deteksi dini.

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa laporan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung kegiatan deteksi dini. Masyarakat sering kali menjadi pihak

pertama yang mengetahui adanya gejala konflik di lingkungan sekitar sehingga informasi yang mereka sampaikan menjadi sumber data awal bagi Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemantauan langsung ke lokasi maupun koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pengamanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial daerah.

Selain berasal dari masyarakat, umpan balik juga diperoleh melalui hasil patroli dan pemantauan yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Kegiatan patroli memungkinkan petugas memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk potensi-potensi gangguan yang belum dilaporkan secara resmi. Melalui patroli tersebut, aparat dapat melakukan identifikasi dini terhadap berbagai gejala yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

Tabel 3
Temuan Penelitian pada Dimensi Umpan Balik

Indikator	Temuan Penelitian
Laporan masyarakat	Menjadi sumber informasi awal mengenai potensi konflik
Verifikasi informasi	Dilakukan sebelum penentuan langkah penanganan
Monitoring lapangan	Dilaksanakan secara langsung oleh aparat terkait
Respons terhadap informasi	Dikoordinasikan secara cepat antarinstansi
Evaluasi kegiatan	Dilakukan melalui rapat koordinasi dan pembahasan bersama

Sumber: Hasil wawancara dan observasi penelitian, 2025.

Berdasarkan **Tabel 3**, terlihat bahwa mekanisme umpan balik dalam sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP telah berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan informasi, verifikasi, koordinasi, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Adanya tahapan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diterima tidak berhenti pada proses pelaporan saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang terstruktur.

Dalam perspektif teori Doctoroff, umpan balik yang efektif ditandai dengan adanya respons yang cepat terhadap informasi yang diterima serta kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah terlihat dalam pelaksanaan deteksi dini di Kota Tarakan. Informasi yang masuk umumnya segera diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, sementara hasil kegiatan lapangan dibahas kembali dalam forum koordinasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas umpan balik masih dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima. Tidak semua informasi yang masuk memiliki tingkat akurasi yang sama sehingga proses verifikasi menjadi tahapan yang sangat penting. Selain itu, keterbatasan personel dan luasnya cakupan wilayah pemantauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh informasi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pelaporan dan penguatan koordinasi antarinstansi masih diperlukan agar mekanisme umpan balik dapat berjalan lebih efektif.

3.3 Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sinergitas antarinstansi. Dalam konteks deteksi dini potensi konflik sosial, kepercayaan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan baik antarpegawai atau antarorganisasi, tetapi juga sebagai keyakinan bahwa setiap pihak mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara profesional untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya kepercayaan, proses koordinasi akan berjalan lambat karena setiap tindakan memerlukan verifikasi berulang, sedangkan kondisi konflik sosial sering kali menuntut respons yang cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah terbentuk melalui hubungan kerja yang berlangsung secara berkelanjutan. Kedua instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Hubungan tersebut tidak hanya terlihat dalam forum formal, tetapi juga tercermin dalam aktivitas koordinasi sehari-hari yang berlangsung tanpa hambatan berarti.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk nyata kepercayaan yang terbangun antarinstansi. Informasi mengenai potensi konflik, hasil pemantauan lapangan, maupun perkembangan situasi sosial dapat dibagikan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Keterbukaan ini mempermudah proses pengambilan keputusan karena setiap instansi memiliki akses terhadap informasi yang relatif sama. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi dalam menentukan langkah penanganan dapat diminimalkan. Kepercayaan juga terlihat dari adanya dukungan timbal balik dalam pelaksanaan tugas lapangan. Ketika ditemukan indikasi potensi konflik sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP dapat saling berkoordinasi serta memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjalin tidak bersifat sektoral, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, yaitu menjaga kondusivitas wilayah Kota Tarakan.

Minimnya ego sektoral menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepercayaan antarinstansi. Masing-masing pihak memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi persaingan kewenangan dalam pelaksanaan tugas. Hubungan yang dibangun lebih menekankan pada prinsip kemitraan dan kolaborasi daripada dominasi salah satu instansi terhadap instansi lainnya. Sikap saling menghargai tersebut menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran koordinasi.

Tabel 4
Temuan Penelitian pada Dimensi Kepercayaan

Indikator	Temuan Penelitian
Keterbukaan informasi	Informasi terkait potensi konflik dibagikan secara terbuka antarinstansi
Dukungan pelaksanaan tugas	Terdapat kerja sama dan saling membantu dalam kegiatan lapangan
Hubungan kerja	Terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan
Koordinasi lapangan	Berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti
Ego sektoral	Relatif rendah karena adanya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing

Sumber: Hasil wawancara dan observasi penelitian, 2025.

Berdasarkan **Tabel 4**, terlihat bahwa dimensi kepercayaan memperoleh dukungan dari berbagai indikator yang menunjukkan hubungan kerja yang positif antarinstansi. Keterbukaan informasi memungkinkan setiap pihak memperoleh gambaran yang sama mengenai kondisi lapangan, sementara dukungan dalam pelaksanaan tugas memperlihatkan adanya komitmen bersama untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat efektivitas kegiatan deteksi dini.

Kepercayaan merupakan elemen yang memungkinkan terbentuknya sinergi karena setiap pihak merasa yakin bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut telah tercermin dalam hubungan antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP Kota Tarakan. Kedua instansi mampu membangun hubungan kerja yang tidak hanya berdasarkan kewajiban formal, tetapi juga berdasarkan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, kepercayaan yang telah terbentuk perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, serta pelaksanaan kegiatan bersama secara berkelanjutan. Hal ini penting karena tingkat kepercayaan antarinstansi dapat berubah apabila tidak didukung oleh interaksi yang konsisten. Semakin sering kedua instansi bekerja sama dan mencapai keberhasilan dalam menangani potensi konflik, maka tingkat kepercayaan yang terbentuk juga akan semakin kuat.

3.4 Kreativitas (*Creativity*)

Kreativitas merupakan dimensi yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi yang dihadapi. Dalam konteks deteksi dini potensi konflik sosial, kreativitas menjadi penting karena karakteristik konflik sosial terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi, dinamika masyarakat, dan pola interaksi sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dituntut tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga mampu mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kreativitas dalam pelaksanaan deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan terlihat dari kemampuan kedua instansi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pengumpulan data dan penyebaran informasi. Jika sebelumnya informasi potensi konflik lebih banyak diperoleh melalui laporan langsung masyarakat dan pemantauan lapangan, saat ini media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi yang turut dimanfaatkan dalam mendeteksi berbagai gejala sosial yang berkembang di masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan keuntungan karena informasi dapat diperoleh lebih cepat sehingga proses identifikasi potensi konflik dapat dilakukan sejak tahap awal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi pesan instan menjadi sarana yang cukup efektif dalam mendukung kegiatan deteksi dini. Berbagai informasi yang beredar di ruang digital dapat menjadi indikator awal adanya potensi konflik, baik berupa perselisihan antar kelompok masyarakat, penyebaran informasi yang memicu keresahan, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Melalui pemantauan media sosial, aparat dapat memperoleh gambaran awal mengenai situasi yang berkembang sebelum melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

Selain pemanfaatan teknologi, kreativitas juga tercermin dari kemampuan instansi dalam membangun hubungan dengan masyarakat sebagai sumber informasi. Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi secara aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Pendekatan tersebut memungkinkan aparat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat karena masyarakat menjadi bagian dari sistem deteksi dini yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Penelitian juga menemukan bahwa kreativitas terlihat dari pola koordinasi yang bersifat fleksibel dan adaptif. Ketika ditemukan informasi mengenai potensi konflik, kedua instansi tidak selalu menunggu pelaksanaan rapat formal untuk melakukan koordinasi. Dalam kondisi tertentu, koordinasi

dapat dilakukan secara langsung melalui media komunikasi digital sehingga langkah-langkah pencegahan dapat segera dirumuskan. Pola kerja yang adaptif tersebut membantu meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Tabel 5
Temuan Penelitian pada Dimensi Kreativitas

Indikator	Temuan Penelitian
Pemanfaatan teknologi	Menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk memperoleh informasi
Inovasi deteksi dini	Mengombinasikan pemantauan lapangan dengan pemantauan media sosial
Keterlibatan masyarakat	Melibatkan tokoh masyarakat dan warga sebagai sumber informasi
Pola koordinasi	Dilakukan secara fleksibel dan adaptif sesuai kondisi lapangan
Pengembangan informasi	Informasi dari berbagai sumber diolah sebagai bahan analisis potensi konflik

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, 2025.

Berdasarkan **Tabel 5**, kreativitas yang dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini dan Satpol PP tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan metode kerja yang lebih adaptif. Kombinasi antara pemanfaatan media digital, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi yang fleksibel menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan strategi deteksi dini dengan perkembangan lingkungan sosial yang terus berubah.

Menurut Doctoroff, kreativitas merupakan unsur penting dalam membangun sinergi karena memungkinkan organisasi menghasilkan nilai tambah yang tidak dapat dicapai apabila setiap pihak bekerja secara terpisah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kreativitas yang dibangun oleh kedua instansi telah menghasilkan mekanisme deteksi dini yang lebih responsif dibandingkan apabila kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh satu instansi saja. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat saling melengkapi sehingga menghasilkan gambaran situasi yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam kegiatan deteksi dini masih dapat ditingkatkan. Penggunaan media sosial saat ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pemantauan informasi, sementara sistem deteksi dini yang terintegrasi secara digital belum tersedia secara khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang pengembangan inovasi yang dapat memperkuat efektivitas deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan telah terbangun melalui komunikasi yang efektif, umpan balik yang responsif, kepercayaan antarinstansi, serta kreativitas dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Sinergitas tersebut diwujudkan melalui koordinasi formal dan informal, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pertukaran informasi, serta pelibatan masyarakat sebagai sumber informasi awal mengenai potensi konflik. Temuan ini memperkuat penelitian Lusi Andriyani, Henni Wijayanti, dan Mohamad Nasih (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan konflik sangat dipengaruhi oleh sinergitas pemerintah, elit lokal, dan komunitas dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian

Eko G. Samudro, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Adityo Santoso (2024) yang menemukan bahwa sistem deteksi dini akan berjalan efektif apabila didukung oleh pemetaan potensi konflik, jaringan informasi yang aktif, serta koordinasi antarlembaga yang responsif. Dalam konteks Kota Tarakan, sinergitas tersebut terbukti mampu mendukung proses deteksi dini terhadap potensi konflik sosial meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa sinergitas yang telah terbangun belum sepenuhnya berjalan secara sistematis karena masih bergantung pada hubungan interpersonal antaraktor, belum didukung oleh regulasi daerah yang khusus mengatur mekanisme deteksi dini, serta masih terkendala keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Cika Nurunnisa Anadirga, Nurliah Nurdin, dan Marja Sinurat (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas penanganan konflik sosial dapat terhambat oleh lemahnya koordinasi, ketidakselarasan informasi, dan belum optimalnya integrasi sistem antarlembaga. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Ida Rochmawati, Imroatul Azizah, dan Amang Fathurrohman (2024) yang menemukan bahwa belum adanya regulasi yang jelas dan keterbatasan dukungan kelembagaan menjadi faktor penghambat efektivitas deteksi dini konflik sosial. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian Habib Rahman Nugraha dkk. (2023) yang menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Pada penelitian di Kota Tarakan, hambatan utama bukan terletak pada tumpang tindih kewenangan, melainkan pada belum tersedianya landasan hukum daerah yang lebih kuat serta ketergantungan terhadap inisiatif individu dalam menjalankan koordinasi. Oleh karena itu, pembentukan regulasi daerah dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat keberlanjutan sinergitas dalam deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tarakan tidak hanya didukung oleh koordinasi formal, tetapi juga oleh hubungan interpersonal yang kuat, komunikasi yang fleksibel, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana deteksi dini dan pertukaran informasi. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi deteksi dini, yaitu keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat minimnya pelatihan, belum terbentuknya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur kewaspadaan dini, serta masih terbatasnya program deteksi dini yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan deteksi dini konflik sosial tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada dukungan regulasi, kapasitas aparatur, dan inovasi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sinergitas antara Tim Kewaspadaan Dini dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam deteksi dini potensi konflik sosial di Kota Tarakan telah terbangun melalui komunikasi yang efektif, umpan balik yang responsif, kepercayaan antarinstansi, serta pemanfaatan kreativitas dan teknologi dalam pelaksanaan tugas, namun belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, belum adanya regulasi daerah yang mengatur deteksi dini, dan belum optimalnya pelaksanaan program terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan penguatan koordinasi lintas instansi, pemanfaatan teknologi dan media sosial, pelibatan masyarakat, serta mendorong pembentukan regulasi daerah guna mewujudkan sistem deteksi dini yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian yang relatif singkat, sehingga pengamatan terhadap pelaksanaan deteksi dini konflik sosial belum dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mekanisme deteksi dini konflik sosial di Kota Tarakan menyebabkan analisis terhadap implementasi kebijakan dan sinergitas antarinstansi belum dapat dikaji secara maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan cakupan informan yang lebih luas agar dapat menggambarkan dinamika deteksi dini konflik sosial secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas regulasi daerah, peran masyarakat dan Satlinmas dalam sistem kewaspadaan dini, serta pengembangan model sinergitas antarinstansi dalam pencegahan konflik sosial di daerah dengan karakteristik serupa Kota Tarakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, serta seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan izin, data, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arfina, A. (2025). Efektivitas kegiatan Sitapa (Sigap Tata Praja) pendidikan dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur untuk meminimalisir kenakalan remaja. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3*(2), 650–657. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.426

Ayano, G., Rooney, R., Pollard, C. M., Dantas, J. A. R., Lobo, R., Jeemi, Z., Burns, S., Cunningham, R., Monterosso, S., Millar, L., Hassan, S., Dovchin, S., Oliver, R., Coleman, K., & Alati, R. (2024). Risk and protective factors of youth crime: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Clinical Psychology Review, 113*, 102479. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102479

Braga, A. A., Welsh, B. C., & Schnell, C. (2015). Can policing disorder reduce crime? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Research in Crime and Delinquency, 52*(4), 567–588. https://doi.org/10.1177/0022427815576576

Doctoroff, M. A. P. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. AMACOM.

Ermaya Suradinata. (2013). *Etika pemerintahan dan geopolitik Indonesia*. Pustaka Ramadhan.

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen komunikasi pemerintahan dalam penyelenggaraan ketenteraman*. Deepublish.

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/memahami-ilmu-pemerintahan/

Nugraha, H. R., Alexander, H. F. S., Adriayanto, A., & Sembiring, H. J. R. (2023). *Sinergitas Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik SARA*.

Rochmawati, I., Azizah, I., & Fathurrohman, A. (2024). *Penguatan forum perempuan lokal di Kecamatan Tosari Pasuruan sebagai deteksi dini konflik sosial di Suku Tengger*.

Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail. (2025). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Alqaprint Jatinangor.

Yesberg, J. A., & Bradford, B. (2021). Policing and collective efficacy: A rapid evidence assessment. *International Journal of Police Science & Management, 23*(4), 417–430. https://doi.org/10.1177/14613557211026938